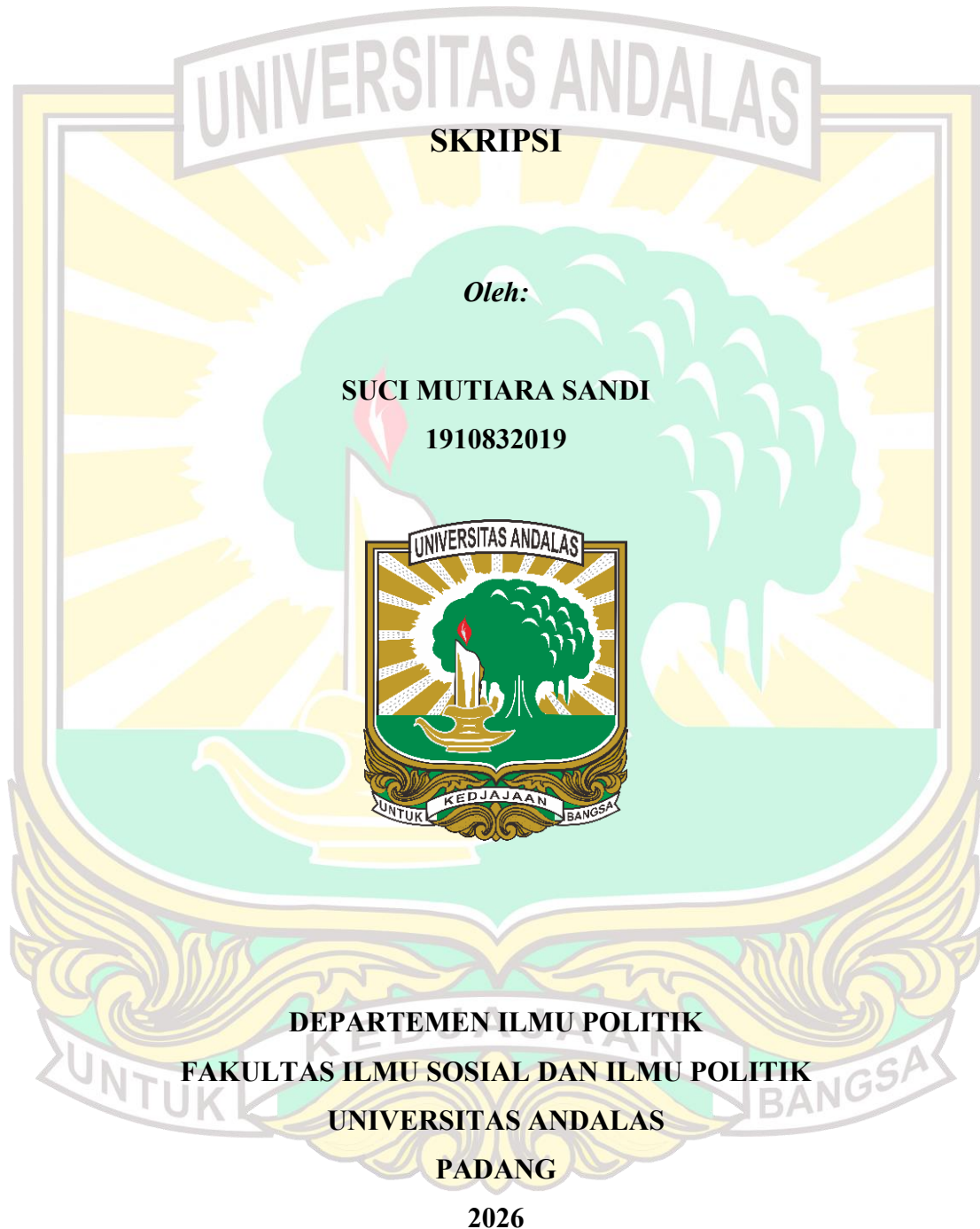


**PEMBANGUNAN POLITIK DI SUMATERA BARAT: ANALISIS  
MASALAH PEMBANGUNAN DI KOTA BUKITTINGGI**



**PEMBANGUNAN POLITIK DI SUMATERA BARAT: ANALISIS  
MASALAH PEMBANGUNAN DI KOTA BUKITTINGGI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

**Oleh:**

**SUCI MUTIARA SANDI**

**1910832019**



**Pembimbing:**

**Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

## Abstrak

Pembangunan politik mengandung makna yang sangat luas; yang menyangkut segala aktivitas yang dilakukan pemerintah atau negara dalam mengubah kondisi politik tertentu menuju ke suatu tatanan yang lebih baik. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan politik merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional secara menyeluruh dalam suatu negara. Di Kota Bukittinggi terdapat fenomena dimana penolakan dan isu lainnya terhadap kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota. Isu tersebut menimbulkan dilema, dimana pemerintah dalam upayanya terus melakukan inovasi pembangunan untuk menggerakkan roda ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, upaya tersebut menimbulkan resistensi dan isu lainnya yang muncul dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan menggunakan kerangka pembangunan politik Huntington yang telah mengidentifikasi dan mengkategorikan ciri dasar pembangunan politik, yaitu rasionalisasi, integrasi, demokratisasi, dan mobilisasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab pembangunan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi memunculkan masalah pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empat ciri dasar pembangunan politik oleh Huntington, atau elemen institusional yang menjadi penanda pembangunan politik telah ada di Kota Bukittinggi, namun masih memiliki kelemahan atau belum berjalan secara optimal. Keberadaannya hadir secara formal, seperti adanya dokumen perencanaan atau RPJMD, pelaksanaan *hearing*, penyediaan wadah partisipasi bagi masyarakat, namun pelaksanaan fungsinya tidak terlaksana secara substantif. Hal tersebut sehingga memunculkan penolakan atas rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

**Kata Kunci:** Pembangunan Politik, Rasionalisasi, Integrasi, Demokratisasi, Mobilisasi

## Abstract

*Political development carries an extremely broad meaning, encompassing all activities undertaken by the government or state to transform a given political condition toward a better order. Accordingly, the success of political development is critical to creating a climate conducive to achieving overall national development within a state. In Bukittinggi, there is a phenomenon of resistance and other issues directed at development policies implemented by the City Government. This issues gives rise to a dilemma: on one hand, the government continues to pursue development innovations aimed at driving the economy for public welfare; on the other, these efforts generate resistance and other issues from various parties. Therefore, using Huntington's political development framework which identifies and categorizes the basic characteristics of political development, namely rationalization, integration, democratization and mobilization, this study aims to analyze the causes of development problems arising from political development carried out by the Bukittinggi City Government. This study employs a qualitative method with an instrumental case study approach. The findings show that the four basic characteristics, or dimensions, of political development identified by Huntington, the institutional elements that mark political development are present in Bukittinggi. Their presence is formal, evidenced by planning documents such as the RPJMD, the conduct of public hearings, and the provision of participatory venues for community; however, their functions are not substantively implemented. This has given rises to rejection of the development plans carried out by the Bukittinggi City Government.*

**Keywords:** *Political Development, Rationalization, Integration, Democratization, Mobilization.*

